

Konsolidasi Paradigma Komunikasi Pembangunan yang Demokratis

Budi Sayoga
Jurusan Ilmu Komunikasi FISIPOL Universitas Gadjahmada
Jl. Sosioyustisia Bulaksumur
Email: budisayoga59@yahoo.com

Abstract

Development Communication is a process that aims to distribute information that can improve the quality of life of the society. In order for the process to be able to be implemented optimally, it must be framed in a democratic climate. Democratization in Indonesia's activities of development of communication activities can be realized if the paradigm is changed. A democratic development communication paradigm is a process of communication in favor of the interests of the people. It also to be done in dialogue, transparency, and in a convergent and egalitarian way. In this reformation era, the paradigm of development communication activities has been working, but not yet perfect, so it must be consolidated. With consolidation model, it is expected that the ideal of formation of a self-empowered society can be optimally realized.

Keywords: paradigm, communications, democratic

Abstrak

Komunikasi pembangunan adalah sebuah proses yang bertujuan untuk mendistribusikan informasi yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Agar proses itu dapat dilaksanakan secara optimal maka harus dibingkai dalam suatu iklim yang demokratis. Demokratisasi dalam aktivitas komunikasi pembangunan di Indonesia dapat diwujudkan apabila paradigmanya diubah. Paradigma komunikasi pembangunan yang demokratis adalah suatu proses komunikasi yang memihak kepada kepentingan rakyat, dilakukan secara dialogis, transparan, konvergen dan egaliter. Di era reformasi dewasa ini paradigma aktivitas komunikasi pembangunan itu sudah berjalan namun belum sempurna, sehingga harus dikonsolidasikan. Dengan model konsolidasi tersebut diharapkan cita-cita terbentuknya masyarakat yang berdaya dan mandiri dapat terealisasi secara optimal

Kata-kata Kunci: paradigma, komunikasi, demokratis

Pendahuluan

Angin perubahan dalam segala bidang semenjak 1998 telah bertiup di Indonesia. Meskipun dampak perubahan berlangsung secara gradual, tetapi harus diakui bahwasannya dinamika perubahan telah terjadi baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun di bi-

dang yang lebih spesifik yakni sistem informasi komunikasi pembangunan. Bergulirnya reformasi politik di Indonesia memberikan imbas terciptanya iklim komunikasi informasi pembangunan yang lebih demokratis dibandingkan pada masa Orde Baru.

Walaupun belum optimal, paradigma komunikasi informasi pembangunan saat ini lebih bercorak egaliter, transparan dan bersifat dua arah. Rakyat diposisikan sebagai subyek pembangunan dan tidak semata hanya menjadi obyek pasif yang keberadaannya tidak diperhitungkan, tidak dilibatkan, kecuali hanya sebagai sasaran doktrin-doktrin politik dari rezim yang berkuasa. Pada masa Orde Baru, rakyat hanya sebagai target pesan semata dan tidak terlibat secara aktif dalam proses perencanaan komunikasi informasi pembangunan. Maka hal itu berimplikasi terjadinya konstruksi komunikasi dan termarginalkannya posisi rakyat. Kondisi ini menghilangkan ide-ide kreatif yang bersifat endemik dan sesuai dengan kebutuhan serta harapan publik. Imbasnya, substansi pesan ketika sampai pada tahap implementasi menjadi suatu hal yang janggal, aneh dan berjarak dengan tata kehidupan lokal suatu komunitas.

Fenomena terpinggirkannya rakyat dari proses konstruksi dan distribusi komunikasi pembangunan pada masa Orde Baru tidak lepas dari karakter politik rezim penguasa pada saat itu. Iklim politik waktu itu tidak memberikan keleluasaan bagi tumbuh suburnya inisiatif dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan difusi informasi pembangunan. Segala kebijakan pemerintah termasuk dalam hal penentuan substansi informasi pembangunan dirancang secara sentralistik dan kemudian disosialisasikan secara *top-down*. Aspirasi warga tidak pernah diakomodasi, harapan dan ke-

inginan masyarakat untuk mencari solusi yang kuat atas berbagai persoalan hidup yang melingkupinya jarang bahkan tidak pernah didengar dan diperhatikan.

Pendek kata, pada era Orde Baru, rakyat tidak dilibatkan sebagai mitra dialog oleh rezim penguasa. Diskusi publik sebagai suatu prasyarat ideal dalam suatu proses pembuatan kebijakan yang demokratis tidak pernah dilakukan sehingga sistem informasi dan komunikasi yang terjadi lebih bercorak monolog, memerintah, memanipulasi dan mengeksploitasi. Dalam model komunikasi yang bersifat monolog, arah komunikasi bersifat linier, alternatif opsi dipersempit sehingga rakyat tidak banyak memiliki kesempatan dan pilihan. Hal ini diperparah dengan konsekuensi atas pilihan-pilihan yang terbatas dan sengaja dibuat tidak transparan (Mulyana, 2001). Ketidaktransparanan ini memang disengaja agar rakyat tidak ada keraguan dan kesangsian ketika harus mengadopsi dan mengimplementasikan suatu ide/gagasan dari rezim, meskipun sebenarnya hasil inovasi tersebut belum terbukti validitasnya.

Corak komunikasi informasi pembangunan yang terjadi pada era itu lebih berpihak pada kepentingan, keamanan dan keamanan sistem politik yang ada dan bukan berpihak pada upaya pemberdayaan rakyat. Fokus pesan komunikasi pembangunan lebih diorientasikan pada substansi dan *interest* komunikator (aparatus) dan bukan pada kebutuhan faktual khalayaknya (Johannesen, 1994). Jadi energi komunikasi dan informasi se-

mata-mata lebih diarahkan pada proses “*struggle to get a political power*”, bukan proses komunikasi pembangunan yang menjanjikan kemaslahatan, keberdayaan serta perubahan yang konstruktif, kreatif dan produktif bagi hajat hidup masyarakat. Pada masa itu rakyat benar-benar hanya sebagai obyek yang dieksploitasi demi aneka kepentingan (politik, sosial, ekonomi) penguasa. Ironisnya upaya-upaya yang eksploitatif tadi dilakukan oleh rezim dengan menggunakan berbagai macam saluran dan media.

Manipulasi dan distorsi pesan oleh pemerintah Orde Baru memanfaatkan media massa (cetak/elektronik) yang sudah disub-ordinasikan lewat kontrol dan pembatasan yang ketat. Media massa baik swasta, terlebih milik penguasa, menjadi instrumen strategis bagi upaya distribusi informasi yang sangat bias kepentingan tersebut. Keberadaan media sebagai “*fourth estate*” hanya sebatas jargon indah yang jauh dari kenyataan. Posisi media massa benar-benar terdegradasi pada titik yang paling rendah. Undang-undang, peraturan maupun kebijakan pemerintah Orde Baru selalu berupaya memberlakukan media massa sebagai alat dalam mendukung eksistensi kekuasaan rezim dan dijauhkan dari fungsi kontrol sosial serta pengawas ruang publik, sebagaimana fungsi ideal yang semestinya melekat pada media massa.

Ruang gerak media massa sangat dibatasi oleh rezim Orde Baru. Media massa yang berani vokal atas kebijakan pemerintah yang menyimpang, minimal

akan mendapatkan “hadiah” gunting sensor dan bahkan maksimal akan ditutup atau dibreidel. Akibatnya, daya kritis dan korektif dari media massa atas kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan publik teredam dan terkubur dalam-dalam. Namun demikian, media massa berusaha “menyelamatkan diri”, karena media massa berupaya untuk tetap menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup dari kerasnya tekanan pemerintah atas media yang dianggap berseberangan. Oleh karenanya, pada waktu itu media hanya sebatas menyajikan informasi-informasi yang tidak substantif sekaligus menjadi alat legalisasi kebijakan pemerintah yang menyimpang. Walaupun terpaksa, media juga menjalankan peran sebagai instrumen *public relation* rezim agar nampak selalu berkilau citra yang melingkupinya.

Di samping memanfaatkan media massa, propaganda dan doktrin-doktrin politik Orde Baru disosialisasikan dengan menggunakan sarana-sarana lembaga kemasyarakatan baik yang bersifat formal maupun informal. Boleh dikatakan tidak ada satu pun lembaga sosial ke-masyarakatan yang tidak terkooptasi dan terintervensi oleh kepentingan rezim. Keberadaan lembaga kemasyarakatan, sebagaimana media massa, juga dikontrol dengan beraneka peraturan dan kebijakan yang melemahkan. Itu semua dilakukan oleh rezim agar lembaga-lembaga tersebut tidak melakukan manuver-manuver politik yang dapat membahayakan sistem politik yang ada. Lembaga sosial kemasyarakatan formal

seperti LKMD, Karang Taruna, Pendidikan PKK, KNPI, Klompencapir ataupun lembaga sosial kemasyarakatan informal seperti kelompok pengajian, persekutuan do'a, takmir masjid dan lain-lain disusupi dan disubordinasi menjadi kepanjangan tangan rezim dalam menstabilkan dan melanggengkan posisi politiknya.

Dalam bingkai sistem politik yang otoriter semacam ini komunikasi informasi yang dialogis, egaliter dan dilandasi semangat yang demokratis antara penguasa dan rakyat jarang terjadi bahkan tidak pernah terjadi. Aneka kebijakan ditentukan secara sepihak dan rakyat dipaksa untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, meski rakyat tidak tahu manfaat, keuntungan dan hal positif yang akan diperolehnya. Sehingga tidak mengherankan apabila saat itu banyak sekali inovasi atau pun informasi pembangunan yang didesiminasi pada publik menjadi barang mubazir dan lenyap di tengah jalan. Suatu inovasi yang terdistribusi dan telah diadopsi oleh publik serta belum pernah dilakukan evaluasi dampaknya hilang begitu saja atau berhenti di tengah jalan. Eksesnya rakyatlah yang memikul beban kerugian atas kegagalan program difusi inovasi tersebut. Namun, kalau rakyat mencoba mempertanyakan secara kritis atas kegagalan adopsi inovasi yang merugikannya itu, bukan jawaban yang komprehensif dan rasional yang diterimanya, tetapi rakyat justru akan memperoleh intimidasi, ancaman dan hal-hal menakutkan lainnya.

Jadi dapat dikatakan bahwa pada masa Orde Baru sistem komunikasi

yang disebutnya sebagai komunikasi pembangunan sangat menjauhkan rakyat dari semangat emansipatoris. Semua informasi yang berkaitan dengan kepentingan pemerintah dimanipulasi, ditutup-tutupi dan direkayasa. Departemen Penerangan sebagai pusat pelayanan informasi bagi upaya pencerdasan masyarakat keberadaannya terkooptasi pemerintah dan dimanfaatkan untuk tujuan politik semata. Departemen ini menjadi instrumentasi dalam membangun citra penguasa agar terkesan konvergen dan demokratis. Aktivitas penerangan lebih ditujukan pada penyampaian informasi dan bukannya pertukaran informasi (dalam terminologi pertukaran informasi terkandung makna adanya kesetaraan antara aparat dan rakyat). Departemen tersebut tidak melakukan fungsi pelayanan informasi secara partisipasi demokratis. Kinerja institusi pemerintah ini sarat kepentingan politik rezim yang berkuasa dan sangat bersifat monopolitik dan hegemonik.

Otoritas tunggal untuk pembuatan kebijakan nasional di bidang komunikasi dan informasi ada di tangan penguasa. Fungsi media massa menjadi kabur dan tanpa makna. Tugas-tugas sosial yang seharusnya dilakukan oleh media massa (misal: fungsi interpretatif/penafsiran, fungsi investigatif, fungsi pengawasan, fungsi pembentuk opini publik) mengalami *kemandegan* dan berada pada titik nadir. Sedangkan saluran-saluran komunikasi kerakyatan terpinggirkan dan mengalami alih fungsi. Barangkali dapat dikatakan bahwa di era ini proses difusi

informasi pada publik sama sekali tidak mengedepankan prinsip netralitas dan prinsip keseimbangan. Aktivitas komunikasi informasi yang dipraktikkan seperti apa yang dikatakan Dennis McQuail lebih diarahkan pada upaya peniadaan terhadap gangguan dan mengupayakan pengamanan diri dari tekanan publik (McQuail, 1987).

Pola distribusi informasi dan komunikasi ditegakkan dengan menggunakan mesin kekuasaan agar dapat secara efektif ditaati dan didukung rakyat. Penerapan sistem informasi yang bercorak persuasif hanya sebatas semboyan tetapi praktiknya adalah penggunaan metode koersif dan kompulsif secara simultan dan sistematis. Institusi-institusi komunikasi yang ada di masyarakat (misal: Klompencapir, *Rembug deso*) diformat menjadi agen penguatan kepentingan rezim. Jadi pemerintah benar-benar melakukan praktik dominasi dan hegemoni atas hak-hak publik khususnya di bidang komunikasi informasi. Kondisi ini memunculkan kultur komunikasi yang sangat paternalistik dan mengesampingkan aspirasi politik rakyat.

Maka dalam rangka membangun paradigma baru di era reformasi, pemerintah Indonesia dan segenap unsur masyarakat melalui lembaga-lembaga swadaya harus melakukan rekonstruksi, reposisi dan reorientasi bidang komunikasi informasi pembangunan. Sistem komunikasi diarahkan dan diprioritaskan bagi terwujudnya masyarakat madani yang damai dan sejahtera. Pola informasi harus diselimuti roh demokratisasi dengan cara

mendekonstruksi paradigma komunikasi informasi pada masa Orde Baru yang sangat distorsif dan kompulsif. Di periode reformasi sekarang, sistem komunikasi informasi di segala bidang, selayaknya bercorak persuasif, nir kekerasan dan egaliter. Pemerintah harus lebih banyak mendengar dan menyerap aspirasi publik dan bukan sebaliknya, banyak berbicara, menasehati dan mencurigai dinamika dan aspirasi masyarakat (Mulyana, 2001). Oleh karena itu maka perlu dikaji lebih lanjut tentang pola, metode dan strategi yang efektif, akuntabel dan rasional sebagai upaya untuk lebih menguatkan dan memperkokoh sistem informasi yang berlangsung demi terkonsolidasikannya dinamika gerak komunikasi pembangunan di Indonesia dewasa ini.

Paradigma Komunikasi Pembangunan yang Demokratis

Dalam sistem komunikasi informasi pembangunan di era reformasi ini pola, corak dan karakter komunikasi pembangunan yang dilakukan seyogyanya memiliki nuansa demokrasi yang kuat. Pola komunikasi informasi yang mendudukkan nilai-nilai demokrasi secara memadai yang ditandai dengan memposisikan fungsi dan peran masyarakat secara sinergis. Rakyat tidak lagi menjadi obyek komunikasi tetapi mereka harus menjadi subyek komunikasi yang menentukan dan mempolakan substansi informasi seperti apa yang dibutuhkan. Dalam pengambilan setiap keputusan, rakyat idealnya diajak berdialog dan berdiskusi

untuk melihat apakah kebijakan yang akan diimplementasikan itu benar, tepat, bermanfaat, dan menguntungkan rakyat. Hal ini perlu dilakukan karena masyarakatlah yang mengetahui apa permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi, kebutuhan yang harus dipenuhi serta bagaimana solusi yang hendak diimplementasi. Oleh karena itu, memposisikan rakyat sebagai mitra dialog adalah suatu hal yang tepat dan tidak terelakkan. Rakyat jangan sampai ditinggalkan atau bahkan dimarginalkan dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan pemenuhan hajat hidup mereka. Apabila keberadaan rakyat diabaikan maka dapat dipastikan tingkat penerimaan rakyat atas informasi inovasi yang di-sosialisasikan tidak akan optimal dan upaya pemberdayaan masyarakat menjadi suatu program kerja yang tanpa makna.

Komunikasi dialogis, egaliter dan dibingkai kemaslahatan bersama antara penguasa dan rakyat merupakan dinamika komunikasi yang berlandaskan nilai demokrasi. Nilai kemanfaatan komunikasi dialogis ini sangat tinggi dan konstruktif. Dengan komunikasi dialogis yang bersifat dua arah, menyimak dan mendengar aspirasi akar rumput dapat dilakukan dengan maksimal. Dengan membuka ruang dialog yang seluas-luasnya maka inti komunikasi yang hakiki dapat tercapai, yakni terlaksananya penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia secara lebih memadai (Adler, 1996). Kondisi itu akan dapat menciptakan sensitivitas penguasa dalam membaca dan

memaknai tuntutan rakyat. Tumpulnya sensitivitas penguasa dalam memahami aspirasi sosial sangat berbahaya karena hal tersebut dapat memerosotkan kredibilitas penguasa di mata publik dan ujungnya dapat memunculkan hilangnya kepercayaan sosial (*social distrust*) kepada aparat penguasa.

Dalam kondisi saat ini, krisis multidimensi yang terjadi di Indonesia masa kini, rakyat membutuhkan akses informasi yang dapat memberikan kontribusi bagi upaya pemberdayaan dirinya. Para *stake holders* (pemerintah, tokoh masyarakat, LSM, institusi swasta) harus bahu-membahu mengembangkan suatu sistem komunikasi yang berbasis kerakyatan, demokratis serta responsif terhadap segala persoalan sosial yang ada beserta dengan solusi penyelesaiannya. Sistem-sistem komunikasi informasi pembangunan itu harus mampu mengembalikan rasa percaya diri masyarakat yang hilang akibat krisis yang masih membelitnya hingga kini. Instrumen komunikasi informasi tersebut hendaknya selaras dengan semangat keadilan, kejujuran demokratis dan memotivasi adanya partisipasi dari publik.

Untuk itulah, maka sistem komunikasi informasi yang demokratis adalah tuntutan yang tidak bisa diabaikan. Sistem komunikasi informasi pembangunan merupakan suatu proses difusi, diseminasi, dan distribusi inovasi kepada publik. Informasi yang disosialisasikan serta disebarluaskan pada publik bermuatan hal-hal/ide/gagasan yang konstruktif, kreatif dan produktif bagi upaya mema-

jukan dan mensejahterakan rakyat. Jadi dengan mengadopsi dan mempraktikkan informasi yang disosialisasikan tersebut diharapkan publik mampu melepaskan diri dari problema yang dihadapi dan ujungnya masyarakat dapat produktif di dalam melaksanakan aktivitas hidupnya. Pesan yang disosialisasikan pada proses komunikasi informasi pembangunan, idealnya dapat memberikan informasi, inspirasi dan motivasi pada target sasarannya. Informatif artinya informasi itu merupakan sesuatu yang baru, mudah dipahami, bernilai dan terjangkau untuk dipraktikkan. Inspiratif maknanya, informasi tersebut dapat memberikan sesuatu yang membangkitkan daya kreatif bagi masyarakat untuk berusaha dalam mensejahterakan dirinya. Sedangkan motivatif maksudnya informasi tersebut dapat mendorong dan membangkitkan semangat pada target audiens dalam berkarya bagi upaya peningkatan kapasitas dan kualitas hidupnya.

Untuk itu, maka operasionalisasi sistem komunikasi dan informasi pembangunan yang demokratis harus mengacu pada model komunikasi partisipatif, emansipatoris dan egaliter. Saluran komunikasi model satu arah yang dijalankan semasa era Orde Baru hendaknya diubah menjadi model komunikasi dua arah bahkan banyak arah. Komunikator yang hanya berorientasi pada propaganda (untuk membangun citra bahwa penguasalah yang selalu benar) dan bersifat sloganistik harus diganti dengan komunikasi yang berorientasi pelayanan serta mensosialisasikan inovasi tanpa memaksa

apalagi mengancam rakyat untuk mengadopsi. Di samping itu, konsep pembinaan hendaknya diganti menjadi konsep pemberdayaan, sebab dalam terminologi pembinaan terkandung makna yang bersifat paternalis dan selalu menempatkan penguasa dalam posisi yang benar. Sedangkan, dalam konsep pemberdayaan terkandung makna adanya kesetaraan antara penguasa dan anggota komunitas, sehingga memungkinkan warga untuk ikut terlibat secara intens dalam upaya penentuan arah perjalanan suatu komunitas

Nuansa komunikasi informasi yang diselimuti iklim demokrasi merupakan sistem komunikasi yang menjauhkan publik dari upaya pembatasan dan pengekangan terhadap akses informasi yang dibutuhkannya. Penguasa harus bertindak bijak dengan memberikan fasilitas dan peluang pada publik dalam memperoleh semua informasi yang memberikan kontribusi secara signifikan bagi kemapanan dirinya. Dengan cara ini maka publik akan memperoleh ruang gerak bagi upaya mengekspresikan aspirasi, artikulasi kepentingan dan mengorganisir diri untuk merealisasikan harapan-harapannya. Jadi dapat dikatakan bahwa atmosfer komunikasi informasi pembangunan yang demokratis dapat terwujud secara nyata apabila informasi yang didesiminasikan oleh pemerintah atau penguasa bersifat transparan dan jauh dari rekayasa. Sistem komunikasi informasi pembangunan harus dapat menciptakan pola komunikasi yang konvergen. Muaranya, pada proses ko-

munikasi tersebut terjadi suatu aktivitas transaksional (pertukaran) informasi. Dalam istilah, transaksi informasi memiliki makna adanya kesetaraan antara aparat dan rakyat sehingga interaksi komunikasi yang terjalin berjalan secara kolaboratif dan sinergis.

Untuk terciptanya suatu sistem komunikasi informasi pembangunan yang demokratis dan kokoh juga dibutuhkan prasyarat lainnya yaitu adanya dukungan media massa yang memiliki kredibilitas tinggi. Media massa selaku institusi penyedia informasi bagi rakyat dituntut dapat menyajikan pesan yang sehat dan bermakna. Informasi yang didifusikan oleh media pada publik hendaknya akuntabel, obyektif, dan rasional. Keberadaan media massa sebagai pendukung terwujudnya satu sistem komunikasi informasi pembangunan yang demokratis dapat dilakukan dengan melaksanakan peran sosialnya sebagai instrumen pemersatu pluralisme berbagai kelompok masyarakat secara independen dan obyektif. Media dituntut menjadi instrumen mediator yang mengantarai kepentingan pemerintah dan masyarakat secara profesional dan bertanggung jawab. Pada sisi lain, media diharapkan perannya sebagai instrumen resolusi konflik ketika terjadi ketegangan antar kelompok masyarakat.

Selain itu, keberadaan media massa dapat pula dijadikan suatu parameter ada tidaknya sistem komunikasi informasi yang demokratis di suatu negara. Apabila eksistensi institusi ini dapat menjalankan fungsi dan peran sosialnya secara efektif dan optimal maka bisa diharapkan bahwa

sistem komunikasi informasi di negara itu berlangsung secara demokratis. Peran sosial dari media yang dimaksudkan adalah pelaksanaan fungsi kontrol sosial yang dilakukannya. Peran kontrol sosial dapat dilihat apakah media bisa secara leluasa dan tanpa restriksi melakukan pembentukan opini, fungsi investigasi, fungsi pengawasan, penafsiran, dan pengungkapan suatu kasus yang terjadi di masyarakat secara komprehensif dan obyektif. Manakala fungsi-fungsi tersebut telah berjalan sebagaimana mestinya maka pelaksanaan komunikasi informasi di negara itu telah berlaku sesuai dengan koridor sistem komunikasi demokratis yang diinginkan. Fungsi-fungsi tersebut penting untuk terealisasi secara maksimal karena hadirnya media dalam suatu sistem sosial merupakan motivator bagi optimalisasi dinamika gerak masyarakat di segala bidang. Berjalannya fungsi sosial media akan memberikan dampak positif untuk munculnya kesadaran masyarakat agar selalu kritis dan tanggap atas berbagai persoalan yang ada serta menjadi pemicu masyarakat agar secara kreatif mencari dan menciptakan formulasi solusi yang paling efektif, rasional dan akuntabel (Lyle, 1990).

Dengan demikian, maka dalam paradigma komunikasi informasi pembangunan di era reformasi ini perlu dilakukannya reorientasi arah dan tujuan aktivitas itu. Reorientasi dibutuhkan agar dinamika komunikasi informasi yang berlangsung tidak tersentralisasikan, linier dan dengan proses yang terisolir. Harapannya supaya aktivitas komu-

nikasi informasi pembangunan dapat lebih merefleksikan difusi partisipasi dan meminimalkan adanya ketergantungan yang tinggi masyarakat pada negara (Weiner, 1996). Reorientasi yang dilaksanakan meliputi perubahan pada proses, media maupun substansi pesan yang dicakup dalam proses komunikasi itu. Paradigma lama komunikasi informasi pembangunan memberikan bentuk pengawasan secara vertikal (*top down*), bersifat satu arah, orientasi propaganda, substansi pembangunan disosialisasikan palsu dan manipulatif, sangat berorientasi teknis dan ekonomis, bias kepentingan negara dan penuh dengan sensor dan pembatasan. Agar tercipta iklim yang demokratis maka komunikasi informasi pembangunan saat ini diupayakan supaya operasionalisasi pengawasan dilakukan secara horizontal (menyamping dan dari bawah ke atas), mengandalkan pada pelayanan serta bukan doktrin dan perintah, komunikasi bersifat dua arah bahkan banyak arah, berorientasi partisipasi dengan mengedepankan kebutuhan dan hak warga negara, mengakomodasi kepentingan semua etnis dan golongan, menggali potensi lokal dengan memacu dan memicu kreativitas serta artistik kulturalnya, selalu mengkaji secara kritis dan dialogis setiap persoalan yang ada untuk bersama-sama mencari alternatif solusinya dan semuanya dilakukan melalui proses yang terencana, terukur serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.

Reorientasi yang dilakukan tersebut merupakan paradigma komunikasi informasi yang dilalui prinsip demokratisasi

dalam konteks komunikasi pembangunan. Dengan cara itulah maka proses komunikasi pembangunan akan mampu menjadi pola komunikasi yang bersifat paradigmatik, yakni merupakan pola komunikasi yang membangkitkan inovasi bagi satu sistem sosial. Pola komunikasi yang terbentuk dapat diharapkan menciptakan sosok masyarakat yang menilai tinggi orientasi ke masa depan, lebih kuat hasrat eksplorasinya di dalam rangka memperbesar kapasitas inovasinya, lebih optimal dalam orientasi ke arah motivasi, prestasi dan hasil kerja. Serta dapat membentuk mentalitas berusaha atas kemampuan sendiri, percaya pada diri sendiri, disiplin dan berani bertanggung jawab.

Mengokohkan Paradigma Komunikasi yang Demokratis

Gerakan reformasi di Indonesia yang ditandai semangat demokratisasi, keterbukaan dan partisipasi telah menimbulkan berbagai dampak, termasuk di bidang komunikasi informasi pembangunan. Institusi komunikasi dituntut untuk melakukan restrukturisasi dan re-fungsional dalam hal posisi dan perannya di masyarakat. Supaya dapat memenuhi target reformasi maka lembaga komunikasi informasi khususnya dalam konteks difusi informasi pembangunan diharuskan lebih bersifat transparan, kooperatif, dan akomodatif terhadap aspirasi masyarakat. Untuk itu, maka institusi komunikasi informasi diharapkan menata kembali visi dan misi yang selama era Orde Baru jadi acuan gerak

operasionalisasinya. Visi dan misi yang baru diharapkan relevan dengan gerak perubahan yang terjadi. Implikasi yang diangankan adalah terciptanya iklim komunikasi informasi yang demokratis, solid, dan teraktualisasi secara konsisten dalam proses difusi inovasi.

Lembaga komunikasi informasi yang ada sekarang idealnya lebih berperan dalam memperkuat kualitas hidup masyarakat dan bukan untuk kepentingan politik penguasa. Lembaga komunikasi difokuskan pada upaya pemihakkan bagi rakyat serta menyuarkan kepentingannya. Dengan penciptaan dan perubahan orientasi, fokus oprasionalisasinya serta strategi pencapaiannya maka hal ini merupakan jawaban terhadap tuntutan reformasi. Reposisi dan refungsional lembaga komunikasi informasi dapat mengubah citra institusi di mata publik. Agar citra yang terbentuk lebih *solid* dan mengakar di masyarakat maka lembaga komunikasi informasi diwajibkan memiliki komitmen dan konsistensi di dalam pelaksanaan tugas-tugas yang diembannya.

Dalam rangka memperteguh nilai kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia yang bersifat plural di berbagai aspek, maka institusi komunikasi memiliki beban tanggung jawab yang besar. Lembaga komunikasi informasi dituntut untuk bisa “merajut” ikatan tali kebhinekaan masyarakat agar selalu setia dan taat pada nilai kebersamaan, keberagaman dan tenggang rasa sosial. Untuk memenuhi tanggung jawabnya itu maka institusi komunikasi harus bisa mendistribusikan

informasi serta menanamkan kesadaran pada publik bahwasannya tegaknya nilai-nilai kebangsaan di Indonesia bukanlah semata-mata tanggung jawab pemerintah namun merupakan tanggung jawab semua pihak termasuk seluruh komponen warga masyarakat. Dengan demikian maka lembaga komunikasi informasi harus melakukan upaya-upaya yang sifatnya peneguhan akan pentingnya menjaga nilai-nilai kebangsaan, pluralisme, dan semangat tenggang rasa antar budaya.

Fungsi dan peran institusi komunikasi informasi hanya akan dapat berjalan seperti apa yang diharapkan apabila kinerja lembaga itu dikelola secara profesional dalam bingkai nilai demokrasi yang nyata dan tidak sekadar semboyan kosong. Oleh karenanya, maka dibutuhkan strategi bagi terwujudnya sosok lembaga komunikasi yang independen dan memiliki komitmen pada pemberdayaan masyarakat. Strategi terwujudnya sosok lembaga komunikasi pembangunan yang berorientasi kerakyatan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai cara. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah mengubah paradigma sistem informasi pembangunan dari yang semula *information transmission* atau hanya sekadar penyampai informasi menjadi *information exchange* atau berorientasi pada pertukaran informasi yang kesemuanya diarahkan pada pola komunikasi yang bersifat paradigmatik.

Dalam operasionalisasi komunikasi yang berorientasi *information exchange* secara substansial di dalamnya terdapat

pendekatan partisipatori demokratis. Pendekatan tersebut mempolakan bentuk komunikasi antara penguasa dengan rakyat yang tidak bersifat vertikal, sentralistik dan satu arah tetapi lebih bersifat konvergensi (memutar). Pola komunikasi yang konvergen lebih memberi peran dan fungsi masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam penentuan isi maupun formula komunikasi pembangunan yang akan dilaksanakan. Pada kondisi ini pemerintah sebaiknya bergeser fungsi dan perannya dalam gerak arus komunikasi pembangunan yang dikelolanya. Penguasa bukan lagi sebagai pemilik otoritas tunggal pembuatan kebijakan nasional di bidang komunikasi informasi. Dalam konteks komunikasi yang bersifat “berputar” pemerintah melaksanakan perannya sebagai institusi yang mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi rakyat (Hamijoyo, 2000).

Dengan bergesernya posisi, peran dan fungsi pemerintah yang mengelola bidang komunikasi informasi pembangunan dimaksudkan supaya dinamika gerak difusi informasi pembangunan oleh pemerintah semata-mata ditujukan pada upaya mentransformasikan masyarakat dari kondisi dan situasi yang penuh ketidakpastian akibat *belitan* krisis multi dimensi ke arah satu iklim yang kondusif dan produktif. Proses komunikasi pembangunan yang disosialisasikan juga ditujukan untuk terjadinya transformasi yang konstruktif baik pada target individual maupun sistem sosial. Transformasi pada target individual dimaksudkan untuk memberikan penyadaran, me-

motivasi dan mengembangkan potensi dan kemampuan tiap individu anggota masyarakat agar mau dan mampu membangun dirinya sendiri, produktif, mandiri serta menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Transformasi pada target sistem sosial ditujukan untuk terjadinya proses penyadaran dan penumbuhan partisipasi aktif anggota masyarakat dalam dinamika pembangunan.

Isu yang disosialisasikan pada target sasaran baik yang bersifat individu maupun sistem sosial seyogyanya berangkat dari hasil kajian yang mendalam dan akuntabel tentang program pembangunan yang dilaksanakan. Substansi pesan yang didistribusikan pada publik berkaitan dengan relevansi suatu kegiatan pembangunan dengan kebutuhan masyarakat, penyelewengan atau ketidaksesuaian antara rencana dengan implementasi serta perbedaan dampak yang dihasilkan suatu kegiatan pembangunan antara kenyataan dan harapan dari masyarakat. Di samping itu dalam komunikasi pembangunan yang demokratis isu yang dikemas adalah berkaitan dengan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Rencana pembangunan harus disosialisasikan pada publik sejak dini karena hal itu dapat membantu menumbuhkan sikap masyarakat ikut berpartisipasi atau mendukung aktivitas pembangunan tersebut. Dengan cara ini akan tercipta pula suatu iklim yang menerima (*receptive climate*) adanya aktivitas pembangunan di lokasi tersebut (Rahmi Atie, 2000).

Informasi yang disosialisasikan dalam aktivitas komunikasi pembangunan yang

demokratis harus diprioritaskan bagi terbentuknya penguatan masyarakat sipil. Untuk itu maka peran serta masyarakat harus lebih dimaknai sebagai hak daripada kewajiban. Kontrol rakyat terhadap isi dan prioritas agenda pengambilan keputusan adalah hak masyarakat sebagai pemegang kata akhir dan mengontrol apa saja yang masuk dalam agenda dan urutan prioritas. Oleh karena itu, hal tersebut tidak dapat diterima jika satu golongan mendikte keinginan dan kepentingannya dalam isi dan prioritas agenda pengambilan keputusan, apakah golongan di dalam negeri seperti pemerintah atau kekuatan eksternal yang berupa “kekuatan besar” (Hikam, 1993).

Model komunikasi pembangunan yang demokratis harus lebih meningkatkan efektivitas partisipasi masyarakat dengan cara meningkatkan intensitas dan kualitasnya. Apabila peran serta masyarakat meningkat efektivitasnya, maka sebenarnya upaya pemberdayaan masyarakat telah dijalankan. Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui pengembangan sumber daya manusia, penguasaan teknologi dan penguatan kelembagaan serta perbaikan sarana dan prasarana ekonomi sosial. Upaya ini membutuhkan kerja sama sinergis dari berbagai kekuatan pembangunan yang ada (Karsidi, 2001).

Untuk mewujudkan masyarakat yang berswadaya dan mandiri maka institusi komunikasi dan informasi harus menjalankan beberapa upaya yang

diarahkan pada munculnya kreativitas dan inisiatif pada target sasarannya. Adapun upaya-upaya itu adalah:

Pertama, belajar dari masyarakat. Prinsip yang paling mendasar mengemukakan komunikasi dan informasi pembangunan sebagai proses yang ditujukan bagi pemberdayaan masyarakat. Proses itu harus dimulai dari, oleh, dan untuk masyarakat. Ini berarti dibangun dari pengalaman, kepercayaan akan nilai dan relevansi pengetahuan tradisional serta kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalah-masalahnya sendiri.

Kedua, komunikator dalam komunikasi pembangunan yang demokratis harus memerankan diri sebagai fasilitator, masyarakat sebagai pelakunya. Konsekuensi dari prinsip pertama adalah perlunya komunikator menyadari perannya sebagai fasilitator dan bukannya sebagai pelaku apalagi guru. Untuk itu perlu sikap rendah hati serta ketersediaan untuk belajar dari masyarakat dan menempatkan warga masyarakat sebagai narasumber utama dalam memahami keadaan masyarakat tersebut. Bahkan dalam penerapannya, masyarakat hendaknya dibiarkan mendominasi kegiatan. Walaupun pada awalnya peran komunikator pembangunan lebih besar, harus diusahakan agar secara bertahap peran itu berkurang dengan mengalihkan prakarsa kegiatan-kegiatan pada warga masyarakat sendiri.

Ketiga, saling belajar, saling berbagi pengalaman. Salah satu prinsip dasar dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat adalah pengakuan akan pengalaman

dan pengetahuan tradisional masyarakat. Hal ini bukanlah berarti bahwa masyarakat selamanya benar dan harus dibiarkan tidak berubah. Kenyataan obyektif telah membuktikan bahwa dalam banyak hal, perkembangan pengalaman dan pengetahuan lokal, kearifan lokal tidak sempat mengejar perubahan-perubahan yang terjadi dan tidak lagi dapat memecahkan masalah-masalah yang berkembang. Namun, sebaliknya telah terbukti pula bahwa pengetahuan modern dan inovasi dari luar yang diperkenalkan oleh orang luar tidak juga memecahkan masalah mereka. Bahkan dalam banyak hal malah menciptakan masalah yang lebih besar dan lebih parah. Untuk itu, harus dilihat bahwa pengalaman dari pengetahuan masyarakat dan kerangka pengalaman komunikator pembangunan harus saling melengkapi serta memiliki kesederajatan dalam hal nilai manfaatnya (Karsidi, 2001).

Agar prinsip-prinsip di atas dapat terimplementasi seperti apa yang diharapkan, maka program aksi komunikasi pembangunan harus dimulai dari pengenalan masalah/kebutuhan, potensi lokal dan penyadarannya. Pada tahap awal ini digali informasi-informasi yang mengungkapkan keberadaan lingkungan dan masyarakatnya serta potensi lokal yang dimilikinya. Dari sini kemudian dilakukan analisa dan refleksi atas persoalan, problem dan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat itu. Dari hasil analisa refleksi atas persoalan dan kebutuhan maka kemudian dirumuskan masalah supaya kinerja komunikasi pembangunan lebih

fokus. Dari hasil rumusan masalah ini pula akan dapat ditentukan skala prioritas penyelesaian masalah atau pemenuhan kebutuhan yang dirasakan masyarakat. Dari skala prioritas itu kemudian diinventarisasi alternatif-alternatif dalam memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan. Dalam inventarisasi alternatif pemecahan masalah atau pemenuhan kebutuhan harus dilakukan dengan cara *brain storming*. Rakyat dilibatkan secara aktif agar mereka menyumbangkan ide-ide yang kreatif, relevan dan rasional atas persoalan dan kebutuhan yang hendak direalisasikan itu.

Dari hasil inventarisasi masalah kemudian ditetapkan alternatif pemecahan masalah yang paling tepat. Kata tepat dimaknai bahwasannya cara itu tepat guna, rakyat mampu untuk melaksanakan dan menerapkan solusi terpilih itu, tidak ada kendala dalam implementasi solusi, baik kendala sumber daya, sumber dana dan kawasan lingkungan ketika solusi tersebut diterapkan. Yang tidak kalah penting untuk diperhatikan dan diperhitungkan yakni pada pelaksanaan alternatif solusi terpilih sehingga rakyat mampu mempraktikannya secara swadaya tidak selalu tergantung pada pemerintah atau pihak-pihak lain yang terkait meskipun di awal pelaksanaan solusi harus tetap didampingi dan diarahkan.

Setelah solusi alternatif dicanangkan maka langkah berikutnya adalah perencanaan tahapan kegiatan yang sistematis dan konkret. Dalam rencana kegiatan ini perlu dipaparkan secara jelas apa yang akan dilakukan, siapa yang

akan melakukan, siapa yang bertanggung jawab atas kelancaran dan keseriusan dalam pelaksanaan dan kapan waktu pelaksanaannya. Makin konkret dan jelas rencana yang dihasilkan maka makin besar kemungkinan bahwa rencana program aksi tersebut akan dilaksanakan secara serius, kontinyu dan tanpa beban. Guna mendapatkan kesempurnaan perencanaan tata kerja maka hasil perencanaan itu juga harus dilakukan diskusi antara pihak fasilitator (komunikator) dan masyarakat sebagai inisiatornya. Kemudian rencana itu dilaksanakan dalam bentuk implementasi kegiatan. Untuk menjamin keberhasilan dari program aksi, maka selama proses kegiatan berlangsung harus dilakukan pemantauan baik oleh pihak komunikator maupun pihak masyarakat sebagai sasaran dari program aksi itu. Pemantauan dilakukan untuk melihat apakah ada kesesuaian atau ada penyimpangan atas pelaksanaan dari rancang bangun kegiatan yang ada. Manakala terjadi penyimpangan maka dapat segera diluruskan dan diarahkan agar tetap konsisten dengan rencana kegiatan yang ada. Akhir dari kegiatan dilakukan evaluasi atas semua kegiatan yang dilaksanakan. Evaluasi yang dilakukan baik menyangkut evaluasi dampak maupun evaluasi proses. Dari hasil evaluasi akan dapat diketahui apa kekurangan, kelemahan, dan kelebihan dari pelaksanaan kegiatan. Dari kekurangan dan keburukan yang diterima dapat dijadikan acuan agar dalam pelaksanaan kegiatan lebih lanjut hal itu bisa lebih disempurnakan, sehingga *output* yang terjadi dapat me-

muaskan, khususnya bagi rakyat sebagai inisiator sekaligus target dari program aksi itu

Simpulan

Paradigma komunikasi pembangunan di Indonesia harus dilakukan proses reposisi, reorientasi, dan refungsional. Hal ini sejalan dengan proses reformasi di segala bidang yang sedang berjalan. Paradigma komunikasi pembangunan harus lebih demokratis dan berpihak pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Agar aktivitas komunikasi pembangunan dapat lebih demokratis maka aktivitas tersebut selayaknya memposisikan rakyat sebagai mitra dialog. Untuk itu rakyat bukan hanya sekadar diposisikan sebagai obyek pasif yang termarginalkan dalam pembuatan keputusan bagi upaya peningkatan kapasitas dan kualitas hidupnya, tetapi rakyat harus diberi peran yang setara dan bersifat sinergis.

Dengan demikian, komunikasi pembangunan dapat dibingkai atmosfer yang demokratis maka dalam setiap aksi-aksinya harus merubah fokus operasionalisasinya. Fokus operasionalisasi komunikasi pembangunan yang demokratis adalah "*information exchange*" dan bukan "*information transmission*" yang diwarnai iklim komunikasi dialogis, transparan, konvergen dan egaliter.

Manakala hal itu tercipta maka dapat diharapkan rakyat akan lebih kreatif, inovatif dan mandiri. Sehingga harapan dan cita-cita bagi terbentuknya masyarakat yang berdaya dalam segala bidang

dapat tercapai. Meskipun untuk merealisasikan hal itu perlu proses dan jangka waktu serta tidak dapat dilakukan secara instan.

Daftar Pustaka

- Adler, Ronald B. 1996. *Communication at Work*. New York: McGraw Hill.
- Hikam, Muhammad A. S. 1993. Demokrasi Melalui Civil Society, Sebuah Tatapan Reflektif atas Indonesia. *Prisma* No. 6. Jakarta: LP3ES.
- Lyle, Jack. 2000. *Communication and Development*. New York: John Levey and Son.
- Johannesen, Richard L. 1994. *Ethics in Human Communication*. Prospect Heights, Ill. Boston: Waveland Press.
- Karsidi, Ravik. 2001. Paradigma Baru Penyuluhan Pembangunan Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Mediator*. Vol. 2. No. 1. Bandung: UNISBA.
- McQuaill, Dennis. 1987. *Teori Komunikasi Massa* (terjemahan). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mulyana, Dedi. 2001. Merancang Peran Baru Humas Dalam Pengembangan Otonomi Daerah. *Jurnal Mediator*. Vol. 2. No. 1. Bandung: UNSIBA.
- Rahmatie, Atie. 2000. Sistem Informasi dan Komunikasi di Indonesia. *Jurnal Mediator*. Vol.1. No.1. Bandung: UNSIBA.
- Weiner, Myron. 2001. *The Dynamics of Growth*. Cambrigde: Forum Lectures.